

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dalam Meningkatkan Pariwisata Di Era Pandemi Covid-19

Muhammad Syafi'ul Munir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Indonesia

Email: akhi.sejati@yahoo.co.id

Abstrak

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengampu kebijakan, salah satunya terkait sektor pariwisata. Wabah covid-19 yang membawa pengaruh sangat besar terhadap Industri pariwisata di Kabupaten Mojokerto, merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah setempat, pengusaha, dan juga masyarakat yang terlibat dalam bidang pariwisata. Dalam meningkatkan sektor pariwisata ini tentunya pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor pariwisata. Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaan Implementasi Kebijakan dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan sektor pariwisata di era pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter & Van Horn yang terdiri dari enam variabel yakni antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik pelaksana.sikap (disposisi) pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait peningkatan pariwisata oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto di era pandemi Covid-19 sudah berjalan baik sesuai dengan variabel menurut Van Horn dan Van Meter, yaitu : Standar & Sasaran, Sumber Daya, Karakteristik Pelaksana, Komunikasi & Koordinasi antar badan pelaksanaan, Sikap (disposisi) Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik. Meskipun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala, namun dalam dapat teratasi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Meningkatkan Pariwisata, Covid-19;

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama tentunya dapat digunakan sebagai pemikat dalam sektor kepariwisataan. Dengan kebijakan kebijakan yang strategis dan tepat guna dapat membuat sektor pariwisata sebagai komoditi yang sangat baik bagi perekonomian dan devisa negara kedua setelah minyak bumi dan gas alam.

Sektor pariwisata juga diharapkan mampu menjadi salah satu tumpuan hidup bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah dan menjalankan fungsinya sebagai pemangku kebijakan yang tentunya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Selain, sektor pariwisata mempunyai peran penting sebagai saran yang efektif dalam mengembangkan, menumbuhkan, mempertahankan budaya- budaya lokal, dan juga untuk lebih mengenal, mempelajari dan mengetahui suatu negara, daerah, masyarakat dan kebudayaannya.

Berbicara tentang Pariwisata, menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintahan daerah. Dalam pariwisata didalamnya mencakup beberapa upaya perencanaan, pengembangan, pemberdayaan, usaha pariwisata, objek, dan daya tarik wisata,

Meningkatnya kondisi buruk pada wabah covid-19 tentunya berdampak besar bagi sektor pariwisata di Kabupaten Mojokerto. Kepala DISBUDPORAPAR Kabupaten Mojokerto, Amat Susilo, mengakui pariwisata lumpuh tidak beroperasi hampir tiga bulan selama penerapan PPKM. Dampaknya Pemkab Mojokerto berpotensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor pariwisata tersebut. Amat Susilo mengatakan potensi kehilangan pendapatan itu bakal berpengaruh terhadap anjaknya target PAD disektor pariwisata tahun 2021. Adapun target PAD disektor pariwisata tahun 2019 dan 2021 jumlahnya yaitu Rp. 14,5 miliar. Penurunan target PAD disektor pariwisata nantinya akan dicantumkan dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (PAPBD) yang hingga pertengahan September 2021 belum diputuskan.

Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pariwisata tersebut diakibatkan oleh adanya penerapan PPKM di masa pandemi yang juga mengakibatkan penurunan pengunjung pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Wisata Kabupaten Mojokerto

Tahun	Jumlah Pengunjung
2018	1.967.133
2019	1.786.656
2020	832.321
2021	477.291
2022	632.119

Sumber : DISBUDPORAPAR Kabupaten Mojokerto

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan terus mengalami penurunan dari 2018 hingga tahun 2021, pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis yaitu pada bulan juli hingga oktober, sedangkan pada bulan agustus 2021 jumlah data pengunjung sama sekali tidak ada, dikarenakan pada bulan tersebut puncak dikeluarkan dan diberlakukannya kebijakan PPKM oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto sehingga sektor pariwisata pada saat itu ditutup. Namun pada tahun 2022 mulai mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada masa transisi pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan pengupayaan peningkatan pariwisata Kabupaten Mojokerto.

Selain itu dengan adanya Pandemi covid-19 berdampak kepada masyarakat yang terlibat langsung dalam sektor pariwisata seperti yang dirasakan oleh petani buah, sayuran yang biasanya selalu menjadi pilihan oleh-oleh bagi para wisatawan jika berkunjung di daerah pacet dan sekitarnya, sehingga jika kondisi seperti ini tentunya pembeli menjadi sepi dan akan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Karena untuk jenis oleh-oleh tersebut tidak dapat bertahan untuk waktu yang lama. Meninjau dari dampak yang dirasakan tersebut, Pemerintah

Kabupaten Mojokerto melakukan pengecekan secara berkala pada objek-objek pariwisata di Kabupaten Mojokerto yang harus ditutup sementara karena aturan PPKM. Dikawatirkan ini diharapkan agar para pengelola pariwisata memanfaatkan untuk memastikan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata tetap terjaga dan berfungsi dengan baik. Pemerintah Kabupaten Mojokerto pun sejauh ini, telah mengeluarkan bantuan sosial sembako bagi para pelaku usaha pariwisata termasuk pedagang kaki lima (PKL) area sekitar wisata yang terdampak PPKM mencapai 1.215 paket, dilansir dari republika (2021).

Dalam permasalahan wabah covid-19 yang membawa pengaruh sangat besar terhadap Industri pariwisata di Kabupaten Mojokerto, merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah setempat, pengusaha, dan juga masyarakat yang terlibat dalam bidang pariwisata. Dengan ada wabah ini tentunya mempunyai dampak yang sangat buruk bagi pihak pengelola wisata di Kabupaten Mojokerto, sehingga dari itu perlu adanya kebijakan terkait peningkatan pariwisata yang lebih efektif agar kegiatan wisata tetap bisa dijalankan di masa pandemi covid- 19, yang tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sehingga berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam Meningkatkan Pariwisata di era Pandemi Covid-19".

Rumusan masalah yang akan dijadikan dasar analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam Meningkatkan Pariwisata di era Pandemi Covid-19 adalah bagaimana implementasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan sektor pariwisata di era pandemi Covid-19. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan sektor pariwisata di era pandemi Covid-19.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat. Penelitian ini dilakukan agar menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk meningkatkan pariwisata di era pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan dengan harapan masyarakat luas untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kepariwisataan di era pandemi ini serta memberikan masukan kepada instansi terkait pelaksanaan suatu kebijakan.

METODE

penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi⁵ (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna

daripada generalisasi. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah survey yakni tujuan dari peneliti deskriptif ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari implementasi strategi kebijakan pemerintah daerah dalam pemulihan pariwisata di Kabupaten Mojokerto. Dasar penelitian ini untuk mendapatkan data atau informasi faktual dan yang mendetail di lapangan terhadap objek penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan informasi berdasarkan 6 variabel dari teori Van Meter & Van Horn yaitu, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana (disposisi), komunikasi antar badan pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

PEMBAHASAN

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah yang menjadi destinasi wisata yang sangat diminati di daerah Jawa Timur. Letak geografisnya yang cukup strategis dan didukung dengan daya tarik serta sumber daya alam yang sangat melimpah menjadikan pemerintah Kabupaten Mojokerto senantiasa melakukan tata kelola peningkatan pariwisata dilakukan agar sektor pariwisata semakin berkembang dan menjadi lebih baik sehingga dapat mencapai PAD. Salah satu cara untuk kembali meningkatkan pariwisata adalah dengan mengeluarkan kebijakan. Dalam hal ini dilakukan ingin membangkitkan kembali daya tarik setelah adanya dampak dari Covid-19 pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Wabah Covid-19 memberikan dampak yang cukup merugikan bagi sektor Pariwisata. Dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini kesehatan masyarakat tentu saja menjadi hal yang utama. Sehubungan akan hal tersebut pemerintah tentu saja tidak tinggal diam guna memulihkan dan meningkatkan sektor pariwisata pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan guna mendukung kestabilan sektor pariwisata.

Peneliti mendeskripsikan Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Pariwisata di Kabupaten Mojokerto di era Pandemi Covid-19 ini berdasarkan konsep dari model implementasi kebijakan Van Horn & Van Meter yaitu dengan 6 indikator, sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran

Dalam implementasi suatu program atau kebijakan tentunya memiliki tujuan akhir yang ingin dicapai. Jika tidak ada tujuan, maka kebijakan tersebut tidak dapat diukur apakah sudah berjalan efektif apa belum. Pemahaman akan standar dan sasaran kebijakan akan menghindarkan terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan. Kinerja suatu kebijakan

dapat diukur dengan skala dan derajat keberhasilan tujuan kebijakan. Tujuan dan budaya sosial yang ada pada tingkat pelaksana kebijakan tersebut bersifat realistik (Agustino, 2006). Van Horn dan Van Metter (dalam, Sulaeman, 1998), memaparkan bahwa untuk mengukur performa dari suatu kebijakan tentu saja menekankan pada standar dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. Performa kebijakan jika disederhanakan adalah salah satu bentuk evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Adapun standar atau sasaran yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam mengeluarkan kebijakan di era pandemi Covid-19 berpedoman pada KEMENDAGRI.

Dalam hal ini kebijakan mengenai peningkatan pariwisata di era pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto cukup memahami mengenai tujuan dari di keluarkannya kebijakan tersebut, yakni untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19, meningkatkan jumlah pengunjung, serta memulihkan dan meningkatkan kembali perekonomian masyarakat di era pandemi. Selain itu berbagai macam upaya dalam memenuhi standar dan sasaran kebijakan juga dilakukan penyediaan fasilitas yang memadai serta melakukan pemasaran atau promosi yang diharapkan dapat mencapai tujuan peningkatan pengunjung di objek wisata di era pandemi covid-19. Sebagaimana yang dikemukakan dalam teori Van Metter dan Van Horn bahwa standar dan sasaran yang jelas dan pemahaman akan standar dan sasaran menjadi salah satu pendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian diharapkan implementasi kebijakan peningkatan pariwisata di era pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto dapat berhasil.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu unsur pendukung terpenting dalam implementasi kebijakan. Kesuksesan suatu kebijakan bergantung pada kapabilitas dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Dapat dikatakan bahwa sumber daya terpenting bagi keberhasilan implementasi kebijakan adalah manusia. Sebuah konsistensi dalam suatu pekerjaan yang diperlukan untuk membuat keputusan, setiap tahapan implementasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Dalam hal ini dari segi kualitas pada implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan pariwisata di era pandemi sudah cukup baik. Pasalnya dari segi latar belakang sumber daya yang cukup berpengaruh terhadap kinerja pegawai atau pelaksana dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan. Kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk menghasilkan sumber daya yang memiliki kualitas seperti diklat, pelatihan, dan bimtek kurang leluasa untuk dijalankan dikarenakan kondisi pandemi.

Sedangkan dalam sumber daya finansial peneliti mendapati penurunan dari anggaran. Hal tersebut dikarenakan kondisi pandemi saat ini membuat PAD turun sehingga alokasi dana lebih di prioritaskan untuk penyediaan fasilitas atau penanganan pandemi Covid-19 di objek wisata Kabupaten Mojokerto. Sehingga ketersediaan dana untuk peningkatan wisata mengalami

kekurangan. Meskipun pada pelaksanaannya ketersediaan fasilitas untuk kenyamanan wisatawan berkegiatan di masa andemi saat ini sedikit perlahanurang diperbaharui terlihat di beberapa tempat cuci tangan tidak tersedia air dan sabun.

3. Karakteristik Pelaksana

Karakteristik pelaksana diketahui bahwa susunan struktur oraganosasi Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi seksi Daya Tarik Destinasi Wisata, seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Seksi Pemasaran Pariwisata. Dari susunan tersebut dapat dilihat pembagian kerja sesuai masing masing seksi dan terdapat hierarki, yaitu ada atasan dan ada bawahan. Hal tersebut merupakan karakteristik utama birokrasi atau organisasi publik. berdasarkan informasi yang di dapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, terkait implementasi kebijakan pemeintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan pariwisata di era pandemi covid-19, masing – masing seksi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Meskipun demikian, seksi – seksi tersebut saling mendukung dan diharapkan pembagian masing – masing seksi dapat mendukung jalannya implementasi kebijakan menjadi efektif dan efisien.

Kemudian implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan pariwisata di era pandemi covid-19 juga melibatkan banyak pihak selain Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kemudian Dinas KOMINFO untuk menyampaikan kepada publik terkait dengan agenda atau kalender kegiatan yang akan dilaksanakan, BPKD sebagai kasir atau juru bayar, ketika anggaran sudah dicantumkan di APBD yang kemudian berlanjut ke BPAD, kemudian BAPPEDA untuk pintu masuk menyelenggarakan suatu program atau kebijakan yang nantinya menyerahkan konsep terlebih dahulu, lalu fungsi lain dari BAPPENDA (Badan Pendapatan daerah) yaitu, terkait dengan pembayaran restribusi yang sebelum pembayaran hal tersebut ada penetapan target dan sebagainya. Termasuk juga Perhutani karena tempat-tempat wisata Kabupaten Mojokerto beberapa di antaranya adalah kawasan Perhutani sehingga dilakukan kerja sama. Kemudian dengan BPCP (Badan Pelestarian Cagar Budaya) ini ada kaitannya karena beberapa destinasi wisata di Kabupaten Mojokerto juga di bawah naungan BPCB seperti candi-candi di Trowulan, Museum, dan Jolotundo.

4. Komunikasi antar Badan Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diatas dapat diketahui bahwa komunikasi dan koordinasi antar pelaksana berjalan dengan baik melalui rapat – rapat yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Melalui rapat-rapat tersebut dilakukan pemaparan program-program atau kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan sehingga setiap bidang dapat mengetahui dan saling mendukung dan bekerja

sama. Komunikasi dan koordinasi juga dilaksanakan dengan instansi lain melalui perjanjian kerja sama (PKS). Dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata bekerja sama dengan beberapa instansi yaitu Perhutani, Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), dan juga Desa.

Terkait kerja sama dengan Perhutani yaitu untuk pengelolaan wanawisata. Wanawisata di Kabupaten Mojokerto juga dipengaruhi oleh kondisi geografis yang dekat dengan pegunungan, kondisi alam yang sejuk dengan pemandangan yang indah yang terletak di wilayah Pacet dan sekitarnya. Wanawisata sendiri yaitu kawasan hutan yang diperuntukan secara khusus, dibina dan dipelihara untuk kepentingan pariwisata. Kemudian untuk kerja sama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dengan Badan Pelestarian Cagar Budaya yaitu untuk pengelolaan wisata berbasis cagar budaya dan edukasi.

Dalam pemanfaatan nilai intrinsik Cagar Budaya selain mengandung potensi dan nilai akademik maupun edukatif, juga mengandung potensi serta nilai estetika dan eksotika yang dapat dikembangkan untuk dapat mendukung Cagar Budaya sebagai objek wisata. Dalam pelaksanaan komunikasi dan koordinasi antar instansi dinilai cukup baik namun sedikit mengalami kendala pada prosedur – prosedur yang dirasa cukup memperlambat pelaksanaan kebijakan atau program-program yang telah disusun dalam hal ini ketika akan melakukan perpanjangan Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan instansi lain harus melalui prosedur – prosedur yang dirasa kurang. Serta beberapa kewenangan – kewenangan yang tidak bisa dihindarkan yang juga dapat memperlambat komunikasi dan koordinasi. Selain komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antar instansi, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat.

Dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata melakukan komunikasi dan koordinasi dalam bentuk sosialisasi dan media melalui promosi. Dengan aktif mengaktifkan media yang juga bekerja sama dengan KOMINFO untuk menyebarkan informasi. Meskipun dalam pelaksanaannya masyarakat sedikit abai untuk melaksanakan protokol kesehatan disaat-saat tertentu. Maka dengan adanya komunikasi dan koordinasi diharapkan dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan pariwisata di era Pandemi Covid-19. Serta dengan demikian tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai.

5. Sikap (Disposisi) Pelaksana

Sikap atau kecenderungan pelaksana terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan pariwisata di era pandemi covid-19 merupakan bentuk respon terhadap kebijakan tersebut. Van Meter & Van Horn menyatakan dalam Agustinus (2006): “penerimaan atau penolakan pembuat kebijakan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kesuksesan atau kegagalan

suatu implementasi kebijakan."Hal ini dapat terlihat berdasarkan wawancara dan observasi diatas yang menyatakan bahwa sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan cukup mendukung implementasi kebijakan peningkatan pariwisata Kabupaten Mojokerto di era pandemi . Terkait respon pelaksana terhadap kebijakan tersebut yaitu positif dengan alasan untuk kebaikan bersama. Pasal dengan kondisi pandemi saat ini cukup banyak kebijakan dan ketentuan yang dikeluarkan sebagai syarat dibukanyakembali sektor pariwisata, maka dari itu pelaksana kebijakan sangat mendukung hal tersebut. Untuk pegawai juga memiliki kemauan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sehingga tidak adanya penolakan dalam pelaksanaan kebijakan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik berkontribusi pada keberhasilan implementasi suatu kebijakan . lingkungan yang tidak cukup baik dapat menjadikan penyebab kegagalan kinerja implementasi suatu kebijakan. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan membutuhkan lingkungan yang kondusif. Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini pada aspek ekonomi dalam hal ini yaitu sebagai pedagang di area wisata dengan adanya kebijakan peningkatan pariwisata di era pandemi tentunya masyarakat mendapatkan dampak positif dan bisa meningkatkan lagi roda perekonomian melalui kegiatan berdagang yang sebelumnya terbatas karena adanya pandemi. Dari segi sosial dalam hal ini wisatawan pun sangat mendukung kebijakan peningkatan pariwisata di era pandemi, hal ini dibuktikan dengan para pengunjung yang sangat kooperatif dalam mematuhi aturan atau syarat yang ada ketika ingin berwisata di masa pandemi dan turut serta dalam kegiatan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pariwisata.

Selanjutnya dari sisi politik, dengan diakukannya kebijakan peningkatan pariwisata Kabupaten Mojokerto di era pandemi sudah mengindikasikan dukungan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan dukungan Bupati Kabupaten Mojokerto yang senantiasa ikut serta dalam memonitoring terutama dalam hal protokol kesehatan agar meminimalisir penyebaran covid-19 sehingga kegiatan wisata dapat terus dilakukan serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi maka dapat dinyatakan bahwa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sudah cukup optimal untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan pariwisata di era pandemi.

PENUTUP

Pandemi global yang terjadi di seluruh dunia telah mengubah kehidupan manusia. Tuntutan untuk menyesuaikan keadaan di era pandemi Covid-19 ini terjadi di

segala aspek kehidupan. Masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di tengah-tengah penyebaran virus Corona. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengendalikan laju perkembangan penyebaran Covid-19. Berbagai kebijakan diambil agar pandemi Covid-19 tidak semakin meluas. Salah satu kebijakan yang diambil adalah peraturan tentang protokol kesehatan termasuk di dalamnya penggunaan masker ketika beraktivitas diluar rumah. Kebijakan penggunaan masker ini direspon bermacam-macam oleh masyarakat. Seperti lazimnya sebuah kebijakan, ada pro dan kontra dalam kebijakan ini. Masing-masing orang memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menyikapi kebijakan tersebut.

Dalam implementasi kebijakan penggunaan masker pada masyarakat kabupaten Jombang, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi kepatuhan kelompok sasaran kebijakan, kebijakan ini dapat dikatakan berhasil apabila ada pengawasan yang ketat. Namun bila ditinjau dari tujuan kebijakan tersebut, agaknya masih jauh dari kata berhasil. Hal ini dapat dilihat dari masih terjadi penambahan kasus konfirmasi positif hari demi hari. Penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu diperlukan adanya kajian lebih mendalam terkait tema-tema serupa bagi peneliti selanjutnya. Penelitian-penelitian dengan tema serupa akan memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A. (2017). Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam kebijakan Pariwisata di Kota Batu. UNESA. Anggraini, D. T. (2021). Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi Covid-19. Khatulistiwa Informatika.
- Ema Tusianti, D. R. (2020). Buku Analisis Isu Terkini. Jakarta: BPS RI.
- I Made Suastika, S. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Upaya Pemulihan Pariwisata. Akademisi dan Praktis Pariwisata.
- IN Juaningsih, Y. C. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. Sosial dan Budaya Syar'i.
- Jumaidi. (2020). Pariwisata Indonesia Pasca Covid-19 Dan Strategi New Normal. Widyamataram.
- Lahamadi, F. M. (2016). Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (Suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara). Administrasi Publik.
- Mali, M. G. (2021). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Era New Normal di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Aplikasi Visiting Jogja. Hospitaliti dan Pariwisata.
- P, I. K. (2021). Akselerasi Pertumbuhan Bisnis di Sektor Pariwisata di Era Pandemi Covid-19 Melalui Pendekatan Pentahelix. Sketsa Bisnis.
- Rizqullah, R. M. (2021). Implementasi Kebijakan Suku Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

- Suastika, I. M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penangan Pandemi Covid-19 Dan UpayaPemulihan Pariwisata. SISTA : Jurnal Akademisi Dan Praktisi Pariwisata .
- Torang, N. (2021). Kebijakan Pariwisata Indonesia Pada Era Pandemi Covid-19. Jurnal Analisa Kebijakan.